

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, IMPLEMENTASI  
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Studi Kasus pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia)

***THE EFFECT OF COMPETENCE OF HUMAN RESOURCES, THE  
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING SYSTEM, AND INTERNAL  
CONTROL SYSTEMS OF GOVERNMENT TOWARD THE QUALITY OF FINANCIAL  
STATEMENT (A CASE STUDY ON UNIT IN THE MINISTRY OF DEFENCE OF  
REPUBLIC OF INDONESIA)***

Juliani Cahya Kartika<sup>1</sup>, Drs. Eddy Budiono, MM., QIA<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

<sup>2</sup>Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

[julianicahya@students.telkomuniversity.ac.id](mailto:julianicahya@students.telkomuniversity.ac.id), [budionoeddy@telkomuniversity.ac.id](mailto:budionoeddy@telkomuniversity.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, implementasi sistem akuntansi instansi dan sistem pengendalian *intern* pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia baik pengaruh secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner yang telah dibagikan kepada beberapa responden.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif verifikatif yang bersifat kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/ keuangan pada satuan kerja unit organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Tehnik penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 89 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis serta didahului dengan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi sumber daya manusia, implementasi sistem akuntansi instansi dan sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial kompetensi sumber daya manusia, dan implementasi sistem akuntansi instansi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian *intern* pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan pengujian kontribusi secara simultan dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas ( $R^2$ ) sebesar 53,5% dan sisanya sebesar 46,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

**Kata Kunci :** kompetensi sumber daya manusia, implementasi sistem akuntansi instansi, sistem pengendalian *intern* pemerintah, dan kualitas laporan keuangan.

**Abstract**

*This study was conducted to determine the effect of the competence of human resources, the implementation of accounting systems for government agencies, and the internal control systems for government agencies on the quality of financial statements within the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia both partially and simultaneously. This study uses primary data collected from questionair which have been distributed to all respondents.*

*This research is descriptive research verification of causality. The population in this study are employees of accounting and finance in the organizational units of the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia. The sampling technique using purposive sampling method, with a total sample of 89 respondents. The data used in this study were analyzed using multiple linear regression analysis and hypothesis testing, and preceded with the classical assumption.*

*The results showed that the competence of human resources, the implementation of accounting systems for government agencies, and internal control systems for government agencies simultaneously affect the quality of financial statements. But the competence of human resources, and implementation of accounting system for government agencies partially had no influence on the quality of financial statements. While the internal control systems for the government agencies is affecting on the quality of financial statements. Based on contributions simultaneous testing influence by independent variables ( $R^2$ ) of 53.5% and the remaining 46.5% is influenced by other factors not examined.*

**Keywords:** competence of human resources, the implementation of government accounting system, internal control systems of government, and the quality of financial statement

## 1. Pendahuluan

Dalam Peraturan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan merupakan pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Pertahanan merupakan penerima alokasi anggaran terbesar setiap tahunnya. Anggaran tersebut di gunakan untuk pertahanan negara terutama dalam mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (*alutsista*). Dalam *Budget In Brife* APBN 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Anggaran juga di jelaskan bahwa APBN pada tahun 2015 tersebut digunakan untuk peningkatan kemampuan pertahanan dalam menegakkan kedaulatan dan keutuhan NKRI modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (*alutsista*) integratif mencapai 40%, matra darat (21%), matra laut (21%), dan matra udara (17%).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Secara spesifik, laporan keuangan pemerintah memiliki tujuan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang di percayakan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga harus bermanfaat sesuai dengan kebutuhan para penggunanya serta Kementerian/Lembaga juga harus memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik selama tahun 2009 hingga tahun 2013, namun pada tahun 2014 kualitas laporan keuangan Kementerian Pertahanan menunjukkan adanya penurunan. Dimana hasil pemeriksaan oleh BPK yang di publikasikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menunjukkan adanya perubahan yang ditunjukkan melalui **Tabel 1**

**Tabel 1 Opini Kementerian Pertahanan RI dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat**

TAHUN	OPINI
2009	WDP
2010	WDP
2011	WDP
2012	WTP-DPP
2013	WTP
2014	WTP-DPP

Sumber: ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

Dengan adanya perkembangan perubahan hasil opini yang di keluarkan oleh BPK RI ini menandakan bahwa Kementerian Pertahanan terus berusaha melakukan perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban khususnya dalam pelaporan keuangan Kementerian/Lembaga. Namun, apabila melihat opini yang dikeluarkan BPK RI untuk laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2014 yang menurun menjadi WTP-DPP menunjukkan bahwa adanya kelemahan atau permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan APBN yang membuat kualitas atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kementerian Pertahanan menurun. Hal ini dimungkinkan karena adanya permasalahan dalam kompetensi sumber daya manusia sebagai pembuat laporan keuangan, implementasi dalam sistem akuntansi instansi sebagai aplikasi yang digunakan dalam pembentukan laporan keuangan Kementerian/ Lembaga, serta Sistem pengendalian *intern* pemerintah yang digunakan dalam melakukan pengendalian agar terhindar dari risiko yang dimungkinkan terjadi dalam pembentukan laporan keuangan.

SDM mempunyai peran utama dalam menerapkan Sistem Pengendalian *intern* Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Apabila kompetensi sumber daya manusia tidak mendukung maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang dimiliki tidak sesuai dengan apa yang harus dihasilkan. Dalam pengelolaan laporan keuangan juga diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang baik agar menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Serta memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan yang baik.

Sistem akuntansi Instansi merupakan komponen terpenting dalam pembentukan laporan keuangan Pemerintah Pusat yang berkualitas karena SAI merupakan sistem wajib yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam mengimplemtasikan SAI diharapkan Kementerian/ Lembaga

mengoptimalkan secara efektif penggunaan sistem SAI dengan sebaik mungkin agar laporan keuangan dapat terjamin kualitasnya.

Dengan adanya SPIP seharusnya mempermudah dalam menjalankan rencana yang telah disusun agar dapat mencapai hasil sesuai dengan standar dan kualitas yang telah ditentukan. Selain itu, dengan adanya SPIP diharapkan hasil dari laporan keuangan yang disajikan memberikan informasi yang andal dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga pada saat pengambilan keputusan tidak mengakibatkan kesalahan yang menimbulkan kerugian organisasi. Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu diantaranya:

1. Bagaimana kompetensi sumberdaya manusia, sistem akuntansi instansi dan sistem pengendalian *intern* pemerintah dan kualitas laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan kompetensi sumberdaya manusia, sistem akuntansi instansi dan sistem pengendalian *intern* pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh secara parsial sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh secara parsial sistem pengendalian *intern* pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia?

## 2. Dasar Teori

### 2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas penjelasan pasal 35(1): "Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati".

Menurut Spencer & Spencer dalam Moehariono (2012:5), kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang di jadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu (*A competency is an underlying characteristic of an individual that is casually related to criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation*).

### 2.2 Implementasi Sistem Akuntansi Instansi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 pasal 1 Sistem Akuntansi Instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI memproses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pada pasal 18 ayat (1) dalam PP Nomor 171/PMK.05/2007 menyatakan setiap Kementerian Negara/Lembaga Wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (SAB-BAPP). Untuk melaksanakan SAI, setiap kementerian negara/lembaga wajib membentuk unit akuntansi yang terdiri atas :

1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B)
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran /Barang-Eselon 1 (UAPPA/B-E1)
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang- Wilayah (UAPPA/B-W)
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang(UAKPA/B)

Definisi kualitas SAI mengacu pada tingkat di mana seseorang pemakai sistem akuntansi merasa terpuaskan oleh *output* (informasi) yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi formal. Sedangkan persepsi manfaat SAI merupakan sikap yang akan mempengaruhi perilaku (*behaviour*) seseorang termasuk kinerja seseorang yang menggunakan Sistem Akuntansi Instansi. Persepsi kegunaan sistem akuntansi yang dimaksud adalah tingkat di mana seseorang yakin bahwa menggunakan SAI akan meningkatkan pertanggungjawaban laporan keuangan. Apabila seseorang menganggap bahwa SAI yang ada bermanfaat bagi pertanggungjawaban laporan keuangan,

maka hal ini akan mempengaruhi perilakunya untuk menggunakan SAI yang ada, akan tetapi sebaliknya apabila dia menganggap bahwa SAI yang ada tidak ada gunanya, maka dia tidak akan menggunakan SAI tersebut (Hazrita, dkk:2013).

### 2.3 Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian *Intern* adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, unsur-unsur pengendalian *intern* pemerintah mengacu pada unsur sistem pengendalian *intern* yang telah diterapkan di lingkungan pemerintahan di berbagai Negara, yang meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

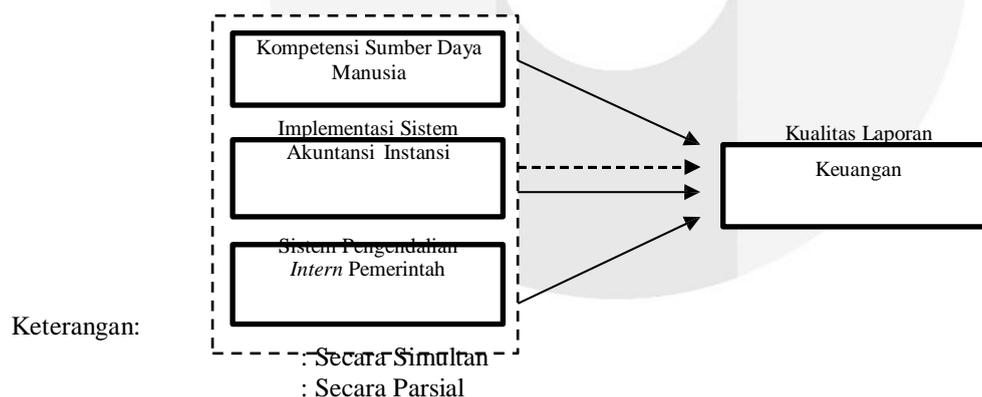
### 2.4 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu (i) Relevan, (ii) Andal, (iii) Dapat Dipahami, dan (iv) Dapat Dibandingkan.

### 2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan pada rumusan masalah, tinjauan teoritis, dan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- $H_1$  : Kompetensi sumber daya manusia, implementasi sistem akuntansi instansi, dan sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
- $H_2$  : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
- $H_3$  : Implementasi sistem akuntansi instansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
- $H_4$  : sistem pengendalian *Intern* pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

### 3. Pembahasan

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dan verifikatif bersifat kausalitas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya melakukan pengujian hipotesis dengan uji F, uji koefisiensi determinasi, dan uji t.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/ Keuangan pada satuan kerja unit organisasi Kementerian Pertahanan RI sebanyak 185 responden. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Banyaknya Sampel pada penelitian ini sebanyak 89 responden.

#### 3.3 Uji Validitas dan Reabilitas

Pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitas maupun reliabilitas yang dilakukan terhadap 89 responden. Hasil menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan adalah valid, di mana nilai korelasinya lebih besar dari pada  $r_{tabel}$  yaitu 0,3. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliabel, di mana nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,7.

#### 3.4 Uji Asumsi Klasik

##### 3.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013:160). Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* karena datanya termasuk rasio. Berdasarkan hasil uji bisa didapat besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0.956 dan signifikansinya pada 0,320. Nilai signifikansi tersebut diatas  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian, artinya data berdistribusi normal.

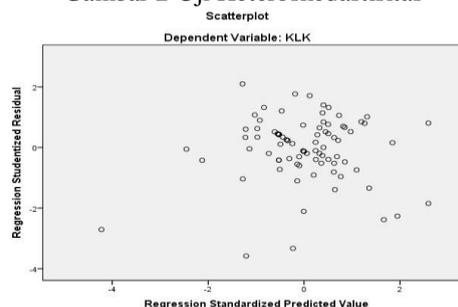
##### 3.4.2 Uji Multikolinearitas

Bedasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa nilai *tolerance* untuk variabel kompetensi sumber daya manusia yaitu sebesar 0,558 dan nilai VIF sebesar 1,793; nilai *tolerance* untuk variabel implementasi sistem akuntansi instansi yaitu sebesar 0,428 dan nilai VIF sebesar 2,335; nilai *tolerance* untuk variabel sistem pengendalian *intern* pemerintah yaitu sebesar 0,474 dan nilai VIF sebesar 2,109; Berdasarkan hasil tersebut nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* semua variabel lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen.

##### 3.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali 2013:139). Uji heteroskedastisitas menggunakan analisis grafik *scatterplot*. Berdasarkan gambar berikut dapat dilihat bahwa penyebaran residual tidak homogen. Hal tersebut dapat dilihat dari plot yang menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan hasil demikian terbukti bahwa persamaan regresi memenuhi asumsi non-heteroskedastis.

Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 20

### 3.4.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013:164) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Nilai  $d$  sebesar 2.146, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan nilai signifikan 5%, jumlah sampel ( $n$ ) 89 dan jumlah variabel independen 3 ( $k=3$ ), maka pada tabel *Durbin-Watson* akan didapat nilai  $d_L$  : 1,586 dan  $d_U$  : 1,725. Oleh karena itu, nilai  $d$  2.146 lebih kecil dari  $4 - d_U$  ( $4 - 1,725$ ) = 2,275. Sehingga  $1,725 < 2,146 < 2,275$  ( $d_U < d < 4 - d_U$ ) maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi autokorelasi.

### 3.5 Analisis Model Regresi Linier Berganda

Dengan menggunakan *software SPSS*, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda dengan nilai konstanta sebesar 3,921, nilai  $b_1$  sebesar -0.002, nilai  $b_2$  sebesar 0,079, dan nilai  $b_3$  sebesar 0,307. Dengan demikian dapat dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$KLK = 3,291 - 0,002KSDM + 0,079ISAI + 0,307SPIP$$

### 3.6 Koefisien Determinasi

Berdasarkan *output* yang di peroleh melalui *SPSS* hasil nilai *R square* ( $R^2$ ) sebesar 0,535 atau 53,5% menunjukkan bahwa kemampuan variabel kompetensi sumber daya manusia, implementasi sistem akuntansi instansi dan sistem pengendalian *intern* pemerintah dalam menjelaskan variabel kualitas laporan keuangan mencapai 53,5%. Sedangkan sisanya sebesar 0,465 atau 46,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

### 3.7 Pengujian Hipotesis

#### 3.7.1 Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

Berdasarkan hasil *output* pada *SPSS* menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 32,602 dan  $F_{tabel}$  sebesar 2,71 dimana jumlah variabel independen dan dependen ( $k$ ) berjumlah 4 dan sample ( $n$ ) berjumlah 89, sehingga  $df_1=k-1$  yaitu  $4-1=3$  dan  $df_2=n-k$  yaitu  $89-4=84$ , sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . Uji signifikan secara simultan menunjukkan angka sebesar 0,000 sehingga probabilitas signifikan  $< 0,05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yaitu bahwa variabel independen kompetensi sumber daya manusia, implementasi sistem akuntansi instansi dan sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### 3.7.2 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai pada variabel kompetensi sumber daya manusia didapatkan  $t_{hitung}$  sebesar -0,030, dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,988 Hal ini berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sama dengan  $-0,30 < 1,988$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,976 lebih besar dari 0,05 sehingga signifikan  $> 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, hal ini berarti secara parsial kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pada variabel implementasi sistem akuntansi instansi didapatkan  $t_{hitung}$  sebesar 0,931 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,988. Hal ini berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sama dengan  $0,931 < 1,988$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,354 lebih besar dari 0,05 sehingga signifikan  $> 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, hal ini berarti secara parsial implementasi sistem akuntansi instansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pada variabel sistem pengendalian *intern* pemerintah didapatkan  $t_{hitung}$  sebesar 6,102 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,988. Hal ini berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sama dengan  $6,102 > 1,988$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05 sehingga signifikan  $< 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, hal ini berarti secara parsial sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

## 4. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan pada hasil penelitian yang didapat melalui penyebaran kuesioner kepada responden., maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia pada satuan kerja unit organisasi Kementerian Pertahanan RI berdasarkan rata-rata tanggapan responden, berada pada katagori “Baik” dengan nilai sebesar 83,79%. Hal ini berarti responden telah memenuhi kriteria dan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia yang telah disepakati, yaitu motif (*motive*), karakteristik/ sifat (*traits*), konsep diri (*self concept*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*).
  - b. Implementasi Sistem Akuntansi Instansi pada satuan kerja unit organisasi Kementerian Pertahanan RI berdasarkan rata-rata tanggapan responden, berada pada katagori “Baik” dengan nilai sebesar 82,9%. Hal ini berarti telah menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian sistem akuntansi insatansi pada satuan kerja Kementerian Pertahanan RI telah dilaksanakan dengan baik.
  - c. Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah pada satuan kerja unit organisasi Kementerian Pertahanan RI berdasarkan rata-rata tanggapan responden, berada pada katagori “Baik” dengan nilai sebesar 82,94%. Hal ini berarti sistem pengendalian *intern* pemerintah dalam satuan kerja pada Kementerian Pertahanan RI telah berjalan dengan baik, yaitu dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
  - d. Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan satuan kerja unit organisasi Kementerian Pertahanan RI berdasarkan rata-rata tanggapan responden, berada pada katagori “Baik” dengan nilai sebesar 80,3%. Artinya, Kualitas Laporan Keuangan pada Kementerian Pertahanan RI telah baik, karena telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
2. Berdasarkan uji signifikansi secara simultan (Uji F) yang telah dilakukan menunjukkan hasil dimana nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $32,602 > 2,71$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yaitu  $0,000 < 0,05$ . Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, implementasi sistem akuntansi instansi dan sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.
  3. Berdasarkan uji signifikansi secara parsial (Uji T) yang telah dilakukan menunjukkan hasil dimana nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0,030 < 1,988$  dan nilai signifikan  $> 0,05$  yaitu  $0,976 > 0,05$ . Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
  4. Berdasarkan uji signifikansi secara parsial (Uji T) yang telah dilakukan menunjukkan hasil dimana nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0,931 < 1,988$  dan nilai signifikan  $> 0,05$  yaitu  $0,354 > 0,05$ . Sehingga, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem akuntansi instansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
  5. Berdasarkan uji signifikansi secara parsial (Uji T) yang telah dilakukan menunjukkan hasil dimana nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6,102 > 1,988$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yaitu  $0,000 < 0,05$ . Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pemerikasa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014.
- [2] ----- . Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013
- [3] ----- . Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012.
- [4] ----- . Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011.
- [5] ----- . Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010.
- [6] ----- . Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009.
- [7] Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi 4*. Semarang: UNDIP.
- [8] Hazrita, Fadilah dkk. (2013). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Akuntansi terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Riau*. Jurnal *SOROT*. Vol. 9 No.1 Hal 59-69. <http://ejournal.unri.ac.id/>
- [9] Moehersono. (2012). *“Pengukuran Kinerja Berbasis Kinerja”*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- [10] Republik Indonesia . Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standart Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.

- [11] ----- . Peraturan Kementerian Pertahanan No. 58 Tahun 2014 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. Jakarta.
- [12] ----- . Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta.
- [13] ----- . Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.
- [14] ----- . Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*. Jakarta.
- [15] ----- . Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- [16] [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) diakses pada tanggal 13 April dan 18 Juni 2015

